

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Persepsi Masyarakat

Pengertian persepsi dari kamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan; adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera (Kartono dan Gulo, 1987 dalam Adrianto, 2006)

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan (Davidoff, 1980 dalam Adrianto, 2006).

Melalui persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Persepsi itu merupakan aktivitas yang *integrated*, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri

individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut (Walgito, 2000 dalam Adrianto, 2006). Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu dengan individu yang lain tidak sama.

Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal: perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan. Sedangkan faktor eksternal adalah: stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh pada persepsi. Bila stimulus itu berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi.

Mengenai pengertian masyarakat dalam kamus bahasa Inggris, masyarakat disebut *society* asal katanya *socius* yang berarti kawan. Arti yang lebih khusus, bahwa masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat dan sebagainya. Sedangkan jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat meliputi pranata, status dan peranan sosial. Sehingga para pakar sosiologi seperti Mac Iver, J.L Gillin memberikan pengertian bahwa masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu

yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama (Musadun, 2000 dalam Adrianto, 2006).

Pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002 dalam Cholisin, 2011). Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. *Pertama*, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat

yang mandiri sebagai partisipan berartiterbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002 dalam Cholisin, 2011).

2. Tujuan dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan (Cholisin, 2011). Masyarakat memiliki potensi dan kekuatan dari sumber-sumber daya alam dan sosial budaya yang dimilikinya. Potensi tersebut perlu digali melalui strategi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Cara menggali inilah yang merupakan inti dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat, kita harus berpegang teguh terhadap konsep dan memahami betul kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang dihadapinya. Masyarakat harus terlibat dalam penyusunan pemecahan masalah yang akan diselesaikan melalui pemberdayaan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus didukung dan ditumbuhkembangkan secara bertahap, perlahan namun pasti dan menyeluruh. Jiwa partisipatif yang ditanamkan terhadap masyarakat akan memunculkan perasaan memiliki terhadap apa yang dikembangkan, karena hal tersebut telah menjadi wadah pemenuhan kebutuhannya.

Terdapat banyak teknik dan metode pemberdayaan secara partisipatif, namun demikian strategi dasarnya adalah sama. Secara garis besar, langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, adalah: (1) Perumusan konsep; (2) Penyusunan model; (3) Proses perencanaan, (4) Pelaksanaan gerakan pemberdayaan; (5) Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan, (6) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan (BEM-FEUI, 2002).

Strategi pemberdayaan masyarakat secara partisipatif melibatkan sejumlah praktisi pembangunan sebagai fasilitator dalam memfasilitasi peningkatan aksesibilitas terhadap sumber-sumber daya yang dikembangkan. Oleh karena itu, para praktisi harus mempunyai keterampilan dalam rangka menciptakan kemampuan-kemampuan internal masyarakat. Kemampuan tersebut, diantaranya: (1) Negosiasi; keahlian meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penawaran program, proyek dan kegiatan yang diusulkan masyarakat. (2) Pengambilan keputusan; keahlian meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan secara demokratis, transparan dan memperhatikan akuntabilitas masyarakat. (BEM-FEUI, 2002)

Menurut Cholisin (2011) Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu; pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-

sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pematapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi

dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

C. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi

Dalam ensiklopedi administrasi disebutkan bahwa arti dari kata "*participation*" adalah sesuatu aktifitas untuk membangkitkan perasaandiikutsertakan dalam kegiatan organisasi, atau ikut sertanya bawahan dalamkegiatan organisasi. Kata "partisipasi" ditinjau dari segi etimologis merupakan meminjam dari bahasa Belanda "*participation*" yang sebenarnya dari bahasa latin "*participatio*" (Suwanto, 1983 dalam Finna, 2010). Perkataan *participatio* sendiri terdiri dari dua suku kata yakni *pars* yang berarti bagian dan *capere* yang berarti mengambil bagian. Perkataan *participatio* itu sendiri berasal dari kata kerja "*participare*" yang berarti ikut serta. Dengan demikian partisipasi mengandung pengertian aktif, yakni adanya kegiatan atau aktifitas.

Davis dalam Finna (2010) mengatakan “*Participation is define as mental andemotional involvement of a person in a group situation which encourages him tocontribute to group goals and share responsibility in them*”. Maksudnya,partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorangindividu dalam situasi kelompok tertentu yang mendorongnya untuk mendukungatau menunjang tercapainya tujuan-tujuan kelompok serta ikut bertanggungjawab terhadapnya.

Menurut Siagian (1985) dalam Finna (2010) bahwa partisipasi itu ada yang bersifat aktif danpasif. Partisipasi pasif dapat berarti bahwa dalam sikap, perilaku dan tindakannyatidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya suatu kegiatanpembangunan. Selanjutnya Siagian (1985) menjelaskan partisipasi aktifberwujud:

- a. Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembagasosial dan politik yang ada dimasyarakat sebagai saluran aspirasinya;
- b. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggidengan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain, sepertikepada pimpinan, tokoh masyarakat, baik yang sifatnya formal maupuninformal;
- c. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggungjawab seperti membayar pajak secara jujur serta berkewajiban lainnya;
- d. Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlakudan;
- e. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunandemi kepentingan bersama yang luas dan penting.

Selanjutnya pengertian partisipasi sosial (*social participation*) menurut Davis dalam Finna (2010) adalah suatu dorongan mental dan emosional (seseorang atau kelompok) yang menggerakkan mereka untuk bersama-sama mencapai tujuan dan bersama-sama bertanggung jawab. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada umumnya dimulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi kegiatan (Cohen dan Uphoff, 1977 dalam Finna, 2010). Secara lebih rinci, partisipasi dalam pembangunan berarti mengambil bagian atau peran dalam pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan mengikuti kegiatan, memberi masukan berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dana atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasilnya.

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya, yaitu : adanya kemauan, adanya kemampuan dan adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Kemampuan dan kemauan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan. Apabila ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, walaupun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi.

Dari pendapat tersebut, diketahui unsur partisipasi adalah a) harus ada tujuan bersama yang hendak dicapai; b) adanya dorongan untuk menyumbang atau melibatkan diri bagi tercapainya tujuan bersama; c) keterlibatan masyarakat baik secara mental, emosi dan fisik, dan; d) harus adanya tanggung jawab bersama demi tercapainya tujuan kelompok.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, secara lengkap dikemukakan oleh Moeljarto dalam Finna (2010). Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut oleh karena itu; a) partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat; b) partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan; c) pembangunan dilaksanakan lebih baik dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki; d) partisipasi memperluas zone (kawasan) penerimaan program pembangunan; e) akan memperluas jangkauan layanan pemerintah kepada seluruh masyarakat; f) partisipasi menopang pembangunan; g) partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia; h) partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah; i) partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Partisipasi melibatkan mental dan emosi lebih banyak dari pada fisik seseorang. Partisipasi yang didorong oleh mental dan emosi disebut partisipasi otonom, sedangkan partisipasi didorong dengan paksaan disebut mobilisasi. Partisipasi mendorong seseorang atau kelompok untuk menyumbang atau mendukung kegiatan bersama, berdasarkan kesukarelaan sehingga tumbuh rasa tanggung jawab bersama terhadap kepentingan kelompok atau organisasi.

Partisipasi secara umum merupakan peran serta atau keikutsertaan/keterlibatan seseorang secara perseorangan atau berkelompok dalam suatu kegiatan. Conyer, 1991 dalam Finna (2010) menjelaskan bahwa pendekatan dalam partisipasi masyarakat adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam rangka memperoleh hasil yang optimal dibutuhkan pendekatan yang mensinergikan potensi masyarakat. Pendekatan ini memerlukan perencanaan matang yang mendorong peran serta aktif masyarakat.

Lebih lanjut Soetrisno, 1995 dalam Finna (2010) menyatakan bahwa ada dua jenis definisi partisipasi yang beredar di masyarakat yaitu : Definisi pertama adalah definisi yang diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia. Definisi partisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Definisi ini mempunyai motto yang berbunyi silahkan anda (baca: rakyat) berpartisipasi, tetapi pemerintah yang merencanakan. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam definisi ini diukur dengan kemauan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah.

Definisi kedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Menurut definisi ini, ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya dikur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan program yang ada di wilayah mereka. Ukuran lainnya adalah ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan itu.

Definisi mana yang akan dipakai akan sangat menentukan keberhasilan dalam mengembangkan dan memasyarakatkan sistem pembangunan wilayah yang partisipatif. Dari sudut pandang sosiologis, definisi pertama tidak dikatakan sebagai partisipasi rakyat dalam pembangunan, melainkan mobilisasi rakyat dalam pembangunan. Mobilisasi rakyat dalam pembangunan hanya dapat mengatasi permasalahan pembangunan dalam jangka pendek. Di Indonesia cenderung menggunakan definisi pertama dalam proses pembangunan, baik yang bersifat nasional maupun regional.

Mikkelsen, 1999 dalam Finna (2010) menegaskan bahwa: Dua alternatif dalam pembangunan partisipasi berkisar pada partisipasi sebagai tujuan pada dirinya sendiri atau sebagai alat untuk mengembangkan diri. Logikanya, kedua interpretasi itu merupakan suatu kesatuan, suatu rangkaian. Keduanya mewakili partisipasi yang bersifat transformasional dan instrumental dalam suatu kegiatan tertentu, serta dapat kelihatan dalam kombinasi yang berbeda.

Kruks, 1983 dalam Finna (2010) menyebutkan bahwa partisipasi instrumental terjadi ketika partisipasi dilihat sebagai suatu cara untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan partisipasi transformasional terjadi ketika partisipasi itu dipandang sebagai tujuan, dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, misalnya swadaya dan dapat berkelanjutan. Sebagai sebuah tujuan, partisipasi menghasilkan pemberdayaan, yaitu setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Dalam bentuk alternatif, partisipasi ditafsirkan sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam manajemen kegiatan sebagai alat dalam melaksanakan kebijakan.

Dengan demikian dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dirangkum indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut:

- a. ikut serta mengajukan usul atau pendapat mengenai usaha-usaha pembangunan baik yang dilakukan langsung maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada;
- b. ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang penentuan program mana yang dianggap cocok dan baik untuk masyarakat;
- c. ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah termasuk dalam hal ini memberikan sumbangan, baik berupa tenaga, iuran uang dan material lainnya;
- d. ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan bersama termasuk di dalam mengajukan saran, kritik dan meluruskan masalah yang tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan tersebut;

- e. dengan istilah lain ikut serta bertanggung jawab terhadap berhasilnya pelaksanaan program yang telah ditentukan bersama;
- f. ikut serta menikmati dan memelihara hasil-hasil dari kegiatan pembangunan.

2. Jenis-jenis Partisipasi

Berdasarkan sistem dan mekanisme partisipasi, Cohen dan Uphoff, 1977 dalam Finna (2010), membedakan partisipasi atas 4 jenis: a) *participation in decision making*; b) *participation in implementation*; c) *participation in benefits*; d) *participation in evaluation*. *Participation in decision making* adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan mengikutsertakan masyarakat, secara tidak langsung mengalami latihan untuk menentukan masa depannya sendiri secara demokratis.

Participation in implementation adalah partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan, uang,

semuanya atau sebagian-sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang.

Participation in benefit adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerataan kesejahteraan dan fasilitas, pemerataan usaha dan pendapatan, ikut menikmati atau menggunakan hasil-hasil pembangunan (jalan, jembatan, gedung, air minum dan berbagai sarana serta prasarana sosial) adalah bentuk dari partisipasi dalam menikmati dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Penikmatan program pembangunan juga ditujukan kepada pegawai pengelola dalam peningkatan kesejahterannya termasuk peningkatan daya potensi dan kreatifitasnya. Partisipasi pemanfaatan ini selain dapat dilihat dari penikmatan hasil-hasil pembangunan, juga terlihat pada dampak hasil pembangunan terhadap tingkat kehidupan masyarakat, peningkatan pembangunan berikutnya dan partisipasi dalam pemeliharaan dan perawatan hasil-hasil pembangunan.

Participation in evaluation adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut sert dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

3. Derajat Partisipasi Masyarakat

Terdapat kadar yang berbeda dalam setiap praktek partisipasi. Kadar ini jika diperbandingkan satu sama lain akan membentuk suatu garis kontinum mulai dari

titik non partisipasi warga sampai kendali warga sepenuhnya. Untuk memperjelas mana proses yang disebut partisipasi dan bukan partisipasi dalam penelitian ini akan mempergunakan konsep delapan tangga partisipasi masyarakat (*Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation*) menurut Arnstein (1969).

Dalam konsepnya Arnstein menjelaskan partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan “*corresponding to the extent of citizen’s power in determining the plan and/or program*”. Secara umum, dalam model ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat : (1) Tidak Partisipatif (*NonParticipation*); (2) Derajat Semu (*Degrees of Tokenism*) dan kekuatan masyarakat (*Degrees of Citizen Powers*). Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar 1.

Gambar 1. Tangga partisipasi dari Arnstein



Sumber : <http://www.georgejulian.co.uk>, 2013

Dua tangga terbawah yang dikategorikan dalam derajat *No Power* atau sering juga disebut *Non Participation* (non partisipasi) menempatkan bentuk-bentuk partisipasi yang dinamakan Manipulasi (*Manipulation*) dan Terapi (*Therapy*). Dalam kedua tangga tersebut partisipasi hanya bertujuan untuk

mendidik “menatar” masyarakat dan “mengobati” masyarakat. Tangga manipulasi bisa diartikan (*relative*) tidak ada komunikasi apalagi dialog sedangkan dalam tangga kedua terdapat komunikasi namun masih bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemerintah (pemegang kekuasaan) dan hanya satu arah.

Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan dalam derajat tandaparticipasi (*Degree of Tokenism*) yaitu partisipasi masyarakat telah didengar dan berpendapat tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan, dalam taraf ini partisipasi masyarakat memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Dalam tangga ketiga yaitu *Information* menyiratkan bahwa komunikasi sudah banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah; tidak ada sarana bagi masyarakat untuk melakukan timbal balik (*feed back*), seperti pengumuman, penyebaran pamflet dan laporan tahunan. Tangga ke empat yaitu *Consultation* bermakna bahwa komunikasi telah bersifat dua arah tetapi masih bersifat partisipasi yang ritual/formalitas, sudah ada kegiatan penjangkauan aspirasi, penyelidikan keberadaan masyarakat, telah ada aturan pengajuan proposal dan ada harapan aspirasi masyarakat akan didengarkan tetapi belum ada jaminan aspirasi tersebut akan dilaksanakan misalnya survei sikap, temu warga dan dengar pendapat publik. Tangga ke lima yaitu *Placation* (penentraman) berarti bahwa komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat (khususnya yang rentan dan termarginalisasi) dimungkinkan untuk memberikan masukan secara lebih signifikan dalam penentuan hasil kebijakan publik, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang oleh pemegang kekuasaan.

Tiga tangga teratas dikategorikan dalam derajat kuasa masyarakat (*Degree of Citizen Power*) dimana masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan partisipasi masyarakat (kelompok masyarakat miskin/rentan) sudah masuk dalam ruang penentuan proses, hasil dan dampak kebijakan dengan menjalankan kemitraan (*partnership*) yaitu masyarakat telah mampu bernegosiasi dengan “pemegang kekuasaan” dalam posisi sejajar, pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) yaitu masyarakat telah mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah “dikuasai”. Pada tangga kendali warga (*citizen control*) partisipasi masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu mengendalikan proses pembentukan, pelaksanaan dan konsumsi dari kebijakan bahkan sangat mungkin masyarakat telah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola suatu objek kebijakan tertentu.

Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Arnstein (1969) terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara bentuk partisipasi semu (*empty ritual*) dengan yang mempunyai kekuatan nyata (*real power*). Didalamnya digambarkan bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dari masyarakat dipaksa atau dimanipulasi dan dimana masyarakat telah mampu mengontrol pembuatan keputusan dan pengalokasian sumber daya. Kemudian masing-masing derajat ditekankan bukan pada seberapa jauh masyarakat telah terlibat dalam proses pembentukan kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan tetapi seberapa jauh masyarakat dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari kebijakan tersebut.

4. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Masyarakat

Perilaku seseorang terhadap suatu objek diwujudkan dengan kegiatan partisipasi, keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Pangestu dalam Swedianti (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang meliputi dua hal, yaitu:

- a. Faktor internal dari individu yang mencakup ciri-ciri atau karakteristik individu yang meliputi : umur, pendidikan formal, pendidikan non formal, luas lahan garapan, pendapatan, pengalaman berusaha dan kosmopolitan.
- b. Faktor eksternal yang merupakan faktor di luar karakteristik individu yang meliputi hubungan antara pengelola dengan petani penggarap, kebutuhan masyarakat, pelayanan pengelola dan kegiatan penyuluhan.

Menurut Sastropetro dalam Swedianti (2011) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang menjadi tiga hal, yaitu :

- a. Keadaan sosial masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan, pendapatan, kebutuhan, kebiasaan dan kedudukan dalam sistem sosial.
- b. Keadaan program pembangunan, kegiatan ini merupakan kegiatan yang dirumuskan dan dikendalikan oleh pemerintah.
- c. Keadaan alam sekitar yang mencakup faktor fisik atau keadaan geografis daerah yang ada pada lingkungan tempat hidup masyarakat tersebut.

Jadi seseorang dapat berpartisipasi terhadap suatu kegiatan pembangunan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal masyarakat merupakan faktor yang terdapat dalam diri masyarakat yang terdiri dari pendidikan formal, pendidikan non formal, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, penghasilan, luas lahan garapan, modal dan umur. Faktor eksternal dari individu merupakan faktor yang berasal dari luar individu, terdiri dari faktor komunikasi yang terdiri dari gagasan, ide, kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah, kebutuhan masyarakat, kegiatan penyuluhan dan faktor geografis daerah yang ada pada lingkungan tempat hidup masyarakat tersebut.

D. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan (PNPM, 2007).

PNPM Mandiri dimulai pada tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat

ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan (PNPM, 2007).

1. Tujuan PNPM Mandiri

Tujuan umum PNPM Mandiri adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan tujuan khususnya adalah

- a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.
- c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
- d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- e. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

2. Prinsip-prinsip PNPM Mandiri

a. Berorientasi pada masyarakat miskin.

Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin

b. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan di setiap proses pengambilan keputusan serta dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan

c. Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Keterpaduan

Keselarasan dan kesetupaduan kebijakan, arah dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan.

e. Efektif dan Efisien

Proses (langkah dan cara kerja) dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

f. Partisipatif

Mengedepankan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

g. Aspiratif

Terbuka terhadap berbagai masukan dan usulan dari semua pihak yang dapat diterima untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

h. Transparansi dan Akuntabel

Masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif maupun legal (Menurut peraturan dan hukum yang berlaku).

i. Keberlanjutan

Mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggung jawab untuk menjaga, mendayagunakan, mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan sistem.

j. Bertumpu pada pembangunan manusia

Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata

k. Otonomi

Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar.

l. Toleransi Budaya

Memahami kemajemukan budaya dari berbagai etnis yang ada di Kabupaten Mesuji sehingga sedapat mungkin tidak melakukan dominasi eksplorasi budaya tertentu kecuali untuk kepentingan bersama dan kemajuan Kabupaten Mesuji secara umum

m. **Kepedulian Lingkungan**

Pembangunan yang dilakukan hendaknya memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

3. Pendekatan PNPM Mandiri

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

- a. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program.
- b. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
- c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
- d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
- e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.

4. Ruang Lingkup PNPM Mandiri

Ruang lingkup kegiatan PNPM-Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi:

- a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya;
- b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini;
- c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs);
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik(PNPM, 2007).

5. Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri

a. Perencanaan

1) Musyawarah Desa (Sosialisasi)

Musyawarah Desa (Sosialisasi) merupakan forum sosialisasi atau penyebarluasan informasi mengenai PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN yang dilaksanakan segera setelah Musyawarah Kecamatan (Sosialisasi). Musyawarah Desa dilaksanakan oleh

Kepala Desa dan difasilitasi oleh Setrawan Kecamatan dan didampingi oleh Pendamping Masyarakat (PM). Peserta musyawarah desa terdiri dari:

- a) Kades dan aparatnya;
- b) Pengurus BPD dan LPMD;
- c) Perwakilan Dusun, RW dan RT;
- d) Pengurus TP-PKK Desa;
- e) Tokoh masyarakat, agama, perempuan dan pemuda;
- f) Kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- g) Dan sebanyak mungkin anggota masyarakat lainnya.

Hasil yang diharapkan Musyawarah Desa (Sosialisasi):

- a) Terinformasikannya PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dan program lainnya kepada seluruh peserta;
- b) Terpilihnya 5 orang Kader Pemberdayaan Masyarakat minimal 2 orang perempuan;
- c) Tersusunnya jadwal pelaksanaan musrenbang Dusun, RW dan RT.

2) Pelatihan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat dilakukan sebagai bekal untuk menjalankan tugas-tugasnya. Untuk materi dan tempat pelatihan di sesuaikan dengan kondisi kecamatan.

3) Musrenbangdus (PKD)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun adalah pertemuan masyarakat atau kelompok-kelompok yang ada di wilayah dusun untuk menemukan gagasan-gagasan kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Gagasan-gagasan

yang disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang diajukan dalam rangka mendapatkan dana PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, tetapi lebih jauh lagi berupa gagasan-gagasan dalam memandang bagaimana masa depan desanya, apa saja program jangka pendeknya, serta apa saja yang menjadi program jangka panjangnya. Untuk efektifitas, maka kegiatan penggalian gagasan dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan rutin kelompok yang sudah ada (formal maupun informal).

Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun adalah warga masyarakat dusun dan kelompok (representasi kelompok perempuan dan rumah tangga miskin). Sedangkan keluaran yang diharapkan dari musyawarah dusun/kelompok adalah:

- a) Daftar potensi dan masalah dusun
 - b) Daftar usulan dusun yang akan dibawa ke Musrenbang Desa (dapat berupa kerangka regulasi maupun kegiatan investasi)
 - c) Penetapan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan secara swadaya dusun
 - d) Daftar nama utusan dusun untuk menghadiri Musrenbang Desa (representasi dari aparat dusun, rumah tangga miskin, kelompok perempuan dan kelompok kemasyarakatan lainnya)
- 4) Musrenbangdes/Review Musrenbangdes

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan stakeholders Desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, untuk desa yang berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan cukup dengan

mereview hasil dari Musrenbangdes reguler atau Musrenbangdes yang telah di lakukan.

Output dari kegiatan Musrenbang Desa adalah:

- a) Adanya potensi dan permasalahan yang dihadapi desa;
- b) Ditetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya;
- c) Ditetapkannya prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya;
- d) Ditetapkannya prioritas kegiatan pembangunan desa yang akan diusulkan pada musrenbang kecamatan;
- e) terdapat utusan desa dari unsur masyarakat terdiri dari; 1 orang tokoh perempuan, 1 orang tokoh masyarakat/agama (khusus untuk kelurahan utusan dari tokoh masyarakat sebanyak 2 orang) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/lurah;
- f) terdapatnya lokasi papan informasi minimal 2 buah per desa;
- g) Ditetapkan visi dan misi desa;
- h) Ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Desa;
- i) Ditetapkan calon pengurus UPK yang akan dipilih pada musrenbang kecamatan;
- j) Adanya memilih utusan desa sebagai pengamat pada musrenbang kecamatan;
- k) Berita acara musrenbang desa.

- Peserta : 1. Kepala Desa, KPMD dan Setrawan Kecamatan
2. Utusan dari dusun
 3. Rumah tangga miskin
 4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau sebutan lainnya
 5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 6. Tokoh agama
 7. Tokoh adat
 8. Tokoh masyarakat
 9. Wakil kelompok perempuan
 10. Wakil kelompok pemuda
 11. Wakil ormas yang ada di lingkup desa
 12. Komite sekolah
 13. Wakil kelompok kemasyarakatan lainnya

5) Penulisan usulan

Penulisan usulan dimaksudkan untuk menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa sesuai dengan format yang telah ditentukan. Penulisan usulan dilakukan oleh tim yang dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan ketrampilan sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan oleh masyarakat, dengan koordinator sekretaris desa.

6) Verifikasi Usulan

Verifikasi usulan adalah kegiatan pemeriksaan usulan yang telah disampaikan oleh desa yang meliputi:

- a) Kelengkapan dan keabsahan dokumen usulan;

b) Observasi lapangan disesuaikan dengan kriteria-kriteria kelayakan usulan; Verifikasi usulan dilakukan oleh tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus. Sebelum melaksanakan tugas, tim verifikasi akan mendapatkan pelatihan. Waktu pelaksanaan setelah penulisan usulan.

7) Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* kecamatan untuk mendapatkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di kecamatan tersebut. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten tahun berikutnya. Keluaran yang diharapkan dari musrenbang kecamatan adalah:

- a) Terbentuknya BKAD yang anggotanya terdiri dari seluruh utusan Desa dan perangkat lain yang diatur dalam AD/ART BKAD;
- b) Daftar prioritas kegiatan yang akan dibiayai dengan dana BLM kecamatan (misalnya dari PNPM MPd);
- c) Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Kabupaten yang akan didanai PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN telah memenuhi kriteria kelayakan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN dan disertai ancar-ancar biaya serta daftar usulan kegiatan bantuan desa tua;
- d) Pemilihan dan penetapan utusan kecamatan yang akan menghadiri musrenbang kabupaten yang berjumlah 6 orang dengan unsur yaitu Camat, Ketua Badan Kerjasama Antar Desa, satu orang wakil Kepala Desa, tiga orang wakil masyarakat) dengan minimal wakil perempuan sebanyak 2 orang;

- e) Terpilihnya pengurus UPK/UPKS yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta Badan Pengawas UPK yang terdiri dari satu orang Ketua dan dua orang anggota;
- f) Berita acara musrenbang kecamatan.

- Peserta :
1. Camat dan staf terkait
 2. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
 3. Instansi dinas terkait (SKPD)
 4. Unsur Bappeda
 5. UnsurBPMPD
 6. Anggota DPRD dari daerah pemilihan bersangkutan
 7. Utusan desa
 8. Wakil/delagasi kelompok masyarakat yang yang beroperasi di wilayah kecamatan
 9. Kepala unit pelayanan di kecamatan
 10. Perwakilan LSM
 11. Ormas yang berkedudukan di kecamatan
 12. Fasilitator Kecamatan (FK) untuk lokasi PNPM MPd
 13. Pendamping Masyarakat (PM)
 14. Setrawan Kecamatan dan Kabupaten
 15. Faskab Integrasi, Faskab Pemberdayaan, Fastekab dan Faskeu
 16. Undangan lainnya

8) Forum SKPD (Prioritas Usulan)

Forum SKPD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait dibantu setrawan Kabupaten dan setrawan propinsi. Output Forum SKPD adalah:

- a) Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil forum gabungan SKPD
- b) Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD (Kabupaten dan provinsi) dan APBN yang termuat dalam Renja SKPD menurut kecamatan dan Desa
- c) Prioritas kegiatan yang sudah dibahas untuk didanai BLM PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten
- d) Berita acara forum SKPD atau gabungan SKPD

Peserta:

- a. Kepala Dinas/Badan dan para pejabat perangkat daerah
- b. Wakil DPRD
- c. Utusan / delegasi kecamatan
- d. Wakil kelompok masyarakat (yang berkedudukan dan beroperasi di Kabupaten) yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD.
- e. Setrawan Kabupaten
- f. Pendamping Masyarakat (PM)
- g. Fasilitator Kecamatan
- h. Pokja RBM

i. Faskab Integrasi, Faskab Pemberdayaan, Fastekab dan Faskeu Undangan lainnya.

9) Penyusunan Design dan RAB Desa

Setelah pelaksanaan forum SKPD dilakukan penyusunan design dan RAB prioritas usulan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN oleh setrawan kecamatan dan kader pemberdayaan masyarakat bersama-sama TPK, Pendamping Masyarakat dan masyarakat (untuk Lokasi PNPM MPd dibantu oleh Fasilitator Teknik)

10) Musrenbang Kabupaten

Musrenbang Kabupaten adalah Musyawarah stakeholders Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD. Output Musrenbang Kabupaten adalah:

- a) Kesepakatan tentang rumusan untuk pemutahiran rancangan SKPD dan Renja-SKPD yang meliputi penetapan KUA, prioritas pembangunan, plafon dana, daftar prioritas kegiatan berdasarkan sumber pembiayaan
- b) Daftar prioritas kegiatan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
- c) Daftar usulan yang akan dibiayai dari dana BLM Kabupaten (PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN)
- d) Daftar usulan regulasi (baru, revisi atau penghapusan).
- e) Sanksi-sanksi kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN.
- f) RKTL PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN.
- g) Berita Acara Musrenbang Kabupaten.

Peserta:

1. Utusan / delegasi kecamatan 6 orang (Camat, Kasi PMD Kecamatan, Ketua Badan Kerjasama Antar Desa, ketua TP-PKK kecamatan, wakil masyarakat kecamatan) dengan minimal wakil perempuan sebanyak 2 orang
2. Para pejabat perangkat daerah
3. Anggota DPRD
4. Wakil LSM
5. Kalangan Praktisi/Akademisi
6. Tim penyusun RKPD
7. Tim penyusun Renja-SKPD
8. Panitia anggaran executive
9. Pokja RBM
10. Undangan lainnya
- 11) Musyawarah Kecamatan (Persiapan Pelaksanaan)

Musyawarah kecamatan ini merupakan forum sosialisasi atau penyebarluasan hasil penetapan alokasi dana PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN yang diputuskan dalam musrenbang kabupaten. Forum ini dilaksanakan baik di kecamatan yang mendapatkan dana PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN maupun yang tidak mendapatkan dana PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Khusus bagi kecamatan-kecamatan yang mendapatkan dana PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, dalam musyawarah kecamatan juga diharapkan hasil-hasil sebagai berikut:

- a) Disepakatinya jadwal pelaksanaan tiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b) Disepakatinya realisasi sumbangan atau kontribusi masyarakat.
- c) Disepakatinya besar insentif bagi pekerja dan tata cara pembayarannya.

- d) Dipahaminya mekanisme pengadaan bahan dan alat.
- e) Terbentuknya Tim Khusus (pemantau kecamatan) yang akan memantau pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, yang terdiri dari anggota BKAD dengan jumlah sesuai kebutuhan.

b. Pelaksanaan

- 1) Musyawarah Desa Persiapan Pelaksanaan.

Kades dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) melaksanakan musyawarah desa pra-pelaksanaan sebelum memulai pelaksanaan kegiatan. Musyawarah Desa Persiapan pelaksanaan difasilitasi oleh kader pembangunan masyarakat/kader Desa dibantu setrawan kecamatan, Pendamping Masyarakat untuk Lokasi PNPM MPd dibantu oleh FK. Hasil yang diharapkan dari Musyawarah Desa Persiapan adalah:

- a) Memilih dan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri ketua, sekretaris, bendahara dan dapat dibentuk bidang-bidang kerja sesuai dengan kebutuhan.
- b) Dibahas dan disepakati tentang peran, fungsi dan pembagian tugas tiap pengurus TPK dalam pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN.
- c) Menyusun rencana kerja detail termasuk penjadwalannya, seperti: rencana rekrutmen tenaga kerja, pengadaan bahan dan alat dll.
- d) Disepakati jadwal, tata cara dan sanksi-sanksi, pertemuan rutin mingguan atau bulanan TPK untuk evaluasi pelaksanaan.
- e) Memilih Tim Khusus (Pemantau) yang terdiri dari :
 - Tim 6 atau Tim Pengawas Desa yang beranggotakan 6 orang.

- Tim 5 atau Tim Pengawas Pendanaan. Yang beranggotakan 5 orang.
- Tim 4 atau Tim Pemeriksa Barang yang beranggotakan 4 orang.
- Tim 3 atau Tim Pemantau Pengadaan Barang yang beranggotakan 3 orang.

2) Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan. Kegiatan-kegiatan dalam tahap tersebut antara lain:

- a. Pencairan Dana
- b. Pengadaan Tenaga Kerja
- c. Pengadaan Bahan dan Alat
- d. Rapat Evaluasi TPK

3) Musyawarah Desa Pertanggungjawaban dan Serah Terima

Untuk mewujudkan transparansi dalam proses pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, TPK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara bertahap kepada masyarakat. Musyawarah pertanggungjawaban minimal dilakukan dua kali yaitu setelah dana terserap $\pm 40\%$ dan Musyawarah pertanggungjawaban ke II dilaksanakan setelah dana terserap sebesar $\pm 80\%$. Sebelum Musyawarah Desa pertanggungjawaban, TPK sudah harus menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dana (LPD) sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan ke desa LPD dan bukti pertanggungjawaban dana tersebut juga harus ditempel dipapan informasi dan disebarluaskan kepada masyarakat desa.

Hasil yang diharapkan dari musdes pertanggungjawaban adalah:

- a) Penyampaian laporan dari TPK tentang: penerimaan dan penggunaan dana, status atau kemajuan dari tiap kegiatan, tingkat partisipasi dan keterlibatan perempuan.
- b) Pernyataan diterima atau ditolaknya laporan pertanggungjawaban dari TPK, berdasarkan hasil voting tertutup dari seluruh peserta pertemuan.
- c) Evaluasi terhadap kinerja dari TPK serta upaya peningkatan pada periode selanjutnya.
- d) Kesepakatan tentang penyelesaian masalah atau keluhan yang timbul di masyarakat.
- e) Pembuatan rencana kerja dan pendanaan untuk periode berikutnya

4) Sertifikasi

Sertifikasi adalah penerimaan hasil pekerjaan berdasarkan spesifikasi teknik oleh Setrawan di bantu dengan Pendamping Masyarakat (PM). Untuk mendorong peningkatan kualitas pekerjaan atau kegiatan. Dengan dilakukan sertifikasi diharapkan fokus tim pengelola kegiatan dialihkan dari mengejar target fisik menjadi mengejar target kualitas.

Setiap jenis pekerjaan dinilai, tetapi untuk pekerjaan yang rumit dapat digabungkan. Pekerjaan yang dinilai telah sesuai untuk di bayar dapat langsung dilunasi, tetapi pekerjaan yang kurang baik harus diperbaiki dulu. Kemajuan pekerjaan (progres) yang dilaporkan didasarkan pekerjaan yang sudah selesai dan dinilai layak untuk dibayar.

Penggunaan langkah sertifikasi ini tidak dimaksudkan untuk memperlambat pembayaran kepada TPK. Setrawan / Pendamping Masyarakat (PM) boleh menunda penilaian jika tidak sempat menilai pekerjaan dan menyetujui pembayaran tanpa dinilai apabila TPK telah terbukti mampu mengerjakan tugas serupa. Sebaliknya jika kualitas bagian yang diusulkan TPK untuk pembayaran sering tidak sesuai persyaratan, langkah ini tidak boleh ditinggalkan.

5) Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi foto seluruh kegiatan dari PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN sebagian besar menjadi tanggungjawab Setrawan dan Pendamping Masyarakat meskipun demikian untuk kepentingan arsip Desa, TPK juga perlu membuat foto-foto sendiri. Pada akhir periode pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, photo dokumentasi harus disusun dalam satu album khusus, dengan ketentuan:

Foto-foto yang ditampilkan merupakan foto PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN di kecamatan yang bersangkutan bukan kumpulan photo dari setiap Desa penerima PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, namun sudah merupakan hasil seleksi dari semua arsip photo yang ada. Tetapi tidak boleh hanya foto dari satu Desa saja. Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas Foto yang ditampilkan Meliputi:

- a) Foto kondisi 0%, 50%, 100%, yang diambil dari sudut pengambilan yang sama
- b) Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja secara beramai-ramai
- c) Foto yang memperlihatkan peran serta perempuan dalam kegiatan prasarana
- d) Foto yang memperlihatkan pembayaran secara langsung kepada masyarakat

6) Penyelesaian Kegiatan

Penyelesaian kegiatan yang dimaksud adalah penyelesaian dari tiap jenis kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban TPK di Desa. Terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dan disesuaikan pada proses ini meliputi:

- a) Pembuatan Laporan penyelesaian Kegiatan
- b) Pembuatan realisasi kegiatan dan Biaya
- c) Musyawarah desa serah terima
- d) Pembuatan surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan

7) Musyawarah Kecamatan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Musyawarah Pertanggungjawaban dilakukan setelah semua Desa melakukan MD pertanggungjawaban, dan dalam rangka mewujudkan transparansi dalam proses pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN di tingkat kecamatan, Desa-Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara umum pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN kepada masyarakat di tingkat kecamatan melalui BKAD. laporan pertanggungjawaban dana secara tertulis harus disampaikan kepada semua peserta Musyawarah Kecamatan dan disebarluaskan kepada masyarakat Kecamatan.

Hasil yang diharapkan dari musdes pertanggungjawaban adalah:

- a) Penyampaian laporan dari Desa tentang: penerimaan dan penggunaan dana, status, tingkat partisipasi dan keterlibatan perempuan.
- b) Pembahasan masalah atau keluhan yang timbul di masyarakat.
- c) Evaluasi kegiatan dan rencana kegiatan Periode Berikutnya.

- 8) Pengendalian
- a) Pemantauan dan pengawasan oleh BPD.
 - b) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- 9) Pelestarian

Tahapan kegiatan Pelestarian dilakukan sesuai ketentuan PNPM-MP. Kecuali bagi Desa yang telah memiliki Perdes tentang Pelestarian hasil kegiatan.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang persepsi, tingkat partisipasi, dan Program PNPM Mandiri telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hasil-hasil penelitian tersebut akan penulis gunakan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi tulisan ini.

Tabel 7. Penelitian Terdahulu Tentang Persepsi, Partisipasi dan Program PNPM Mandiri

No	Penulis	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Kesimpulan Hasil
1.	Emby, 2011 <i>Relationship Between citizen's Perception and Level of Participation in Local Government</i>	- Persepsi - Partisipasi	Metode kuantitatif Likert-scale Arnstein ladder <i>Pearson correlation</i>	Tidak ada hubungan antara persepsi warga terhadap tingkat partisipasi (nonparticipation, tokenisme, dan kekuasaan warga negara). Persepsi "positif" dari warga terhadap partisipasi saja tidak cukup, persepsi anggota pemerintah lokal akan menjadi penting juga. Jika anggota pemerintah daerah tidak menanggapi tuntutan warga, partisipasi tidak mungkin.
2.	Okafor, 1987 <i>Participatory Development in Rural Nigeria</i>	Indeks Partisipasi: $PI^d = \frac{\sum_{i=1}^N d_i}{\sum_{i=1}^N D_i} \times 100$	PI ^d : indeks partisipasi untuk proyek pembangunan; N: jumlah faktor partisipasi; d _i : skor aktual oleh responden pada masing-masing faktor; D _i : skor maksimum yang setiap faktor bisa.	Penelitian partisipatif dua kelompok masyarakat pedesaan Bendel State, Nigeria. Data menunjukkan bahwa warga ingin terlibat dalam memulai dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan pedesaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan sangat antusias dalam memenuhi prioritas kebutuhannya. Sehingga pemerintah dapat berkonsentrasi pada penyediaan infrastruktur ekonomi dan sosial dasar.

No	Penulis	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Kesimpulan Hasil
3.	James ES, 2007 Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang	- Kemiskinan - Sarana sosial dasar - Sarana ekonomi - Kesempatan kerja	Pengumpulan data primer melalui wawancara kepada responden terpilih dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan (kuisisioner). Metode analisis yang digunakan adalah model <i>maximum likelihood</i> .	1. Penyediaan sarana sosial dasar dan sarana ekonomi melalui program pengembangan kecamatan berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu dengan dan Kecamatan Pantai Labu. 2. Penyediaan lapangan kerja melalui program pengembangan kecamatan berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu dengan dan Kecamatan Pantai Labu.
4.	Supriyono, 2009 Pengaruh Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo	- Kinerja Tenaga Pendamping - Bantuan Modal - Pemberdayaan Keluarga Miskin pada program PPK	<i>Explanatory research</i>	1. Bantuan Modal berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Keluarga Miskin 2. Kinerja Tenaga Pendamping berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Keluarga Miskin 3. Bantuan Modal dan Kinerja Tenaga Pendamping masing-masing berpengaruh positif signifikan terhadap Pemberdayaan Keluarga Miskin
5.	ESCAP, 2009 Pendekatan Partisipatif untuk Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan Pedesaan	Menggunakan Model Tangga Partisipatif Arnstein	8 (delapan) Tangga Partisipatif Arnstein: 1. <i>Manipulation</i> , 2. <i>Therapy</i> , 3. <i>Informing</i> , 4. <i>Consultation</i> , 5. <i>Placation</i> , 6. <i>Partnership</i> , 7. <i>Delegated Power</i> 8. <i>Citizen Control</i>	Beberapa kebijakan khusus pembangunan pedesaan partisipatif meliputi: 1. Legislasi untuk organisasi masyarakat pedesaan, termasuk kebebasan penuh dasar; reorientasi sistem pengiriman, khususnya layanan ekstensi, terhadap kebutuhan masyarakat miskin pedesaan, integrasi penuh perempuan dalam pembangunan, desentralisasi pengambilan keputusan, perencanaan dan alokasi sumber daya; 2. Penelitian berorientasi pada masyarakat miskin pedesaan, ekstensi, pasokan input, kredit dan pemasaran didukung oleh sumber daya keuangan yang diperlukan dan ditujukan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan meningkatkan, baik pertanian dan nonpertanian, dan hanya fiskal dan sistem harga (van Heck, 2003). 3. Proyek pembangunan partisipatif desa harus melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, seperti pemerintah daerah, bank, pelatihan dan lembaga penelitian, dewan perempuan dan pemuda, mereka juga harus terus melibatkan organisasi masyarakat sipil di semua tingkatan. Lembaga pemerintah perlu menjadi lebih terbuka terhadap keuntungan menggunakan pengetahuan lokal untuk meningkatkan produktivitas pertanian, konservasi air dan pengelolaan sumber daya alam dan menghubungkan masyarakat lokal dan petani kecil. Penelitian tentang sistem yang berkelanjutan dan padat karya produksi pertanian, pedesaan pekerjaan non pertanian dan pengembangan usaha (Polman, 2001: 10), inovasi dan perluasan proyek pembangunan pedesaan yang paling inovatif atau teknologi, sekaligus menjaga biaya dan risiko dalam batas yang dapat diterima seperti proyek-proyek percontohan
6.	Sofianto dkk, 2009 Kajian Kapasitas dan Keberlanjutan Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Pedesaan dan	Kapasitas Kelembagaan Program PNPM Mandiri Pedesaan	Penelitian eksploratif	1. Kapasitas kelembagaan program PNPM Mandiri Pedesaan telah mampu mengkoordinasikan segenap struktur kelembagaan penanganan kemiskinan, namun belum mampu secara sinergis memberdayakan dan menopang struktur kelembagaan yang ada di pemerintah daerah 2. UPK mampu menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat pedesaan karena memiliki keunggulan dalam kemudahan akses dan sistem

No	Penulis	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Kesimpulan Hasil
	Pengelolaan Keuangan di Unit Pengelola Kecamatan (UPK) (Studi Kasus di Kabupaten Temanggung dan Demak)			pengembalian dana yang disesuaikan kondisi masyarakat.
7.	Syukri dkk, 2010 Studi Kualitatif Dampak PNPm Perdesaan 2010	<ul style="list-style-type: none"> - Kemiskinan - Pemerintahan, partisipasi, dan transparansi - Pemberdayaan dan kebutuhan desa 	Studi evaluasi dampak ini adalah studi kualitatif yang berusaha membandingkan kondisi daerah perlakuan dengan kondisi daerah kontrol pada tiga potongan waktu, yaitu setahun yang lalu (2009), tiga tahun yang lalu (2007), dan delapan tahun yang lalu (2002).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara umum, PNPm Perdesaan telah dilaksanakan dengan cukup baik, kecuali dalam beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan tidak begitu efektif b. Para fasilitator memiliki pemahaman yang tidak sama tentang program sehingga menimbulkan keragaman dalam pelaksanaan program. 2. PNPm Perdesaan dianggap sangat bermanfaat oleh masyarakat, terutama untuk penyediaan infrastruktur di perdesaan. 3. Sebagai mekanisme penyaluran dana pembangunan dari pusat ke desa, program ini sangat efektif dan efisien. 4. Hampir di semua desa penelitian, terjadi penurunan angka kemiskinan. 5. Penciptaan lapangan kerja dalam proyek infrastruktur PNPm Perdesaan tidak cukup membantu warga miskin. 6. Partisipasi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dalam tahapan-tahapan PNPm Perdesaan cenderung meningkat. Namun, partisipasi itu tampaknya hanya untuk memenuhi ketentuan program. 7. Dalam berbagai forum pengambilan keputusan di desa, atau dalam program selain PNPm yang tidak mensyaratkan partisipasi warga, elite desa masih sangat dominan, sementara warga masyarakat, apalagi yang miskin, nyaris tidak terlibat.
8.	Yulianti, 2012 Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perkotaan di Kota Solok	Deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. Dengan jenis data yang digunakan adalah data primer (hasil wawancara/kuesioner dan survey) dan data sekunder (tinjauan literatur dan data yang diambil dari berbagai instansi).	1. Partisipasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNPm Mandiri Perkotaan belum mampu mewujudkan tujuan khusus dari PNPm Mandiri diantaranya meningkatkan partisipasi orang miskin. 2. Tingkat partisipasi masyarakat Kota Solok dalam PNPm Mandiri perkotaan tergolong rendah. 3. Rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh faktor kemiskinan, pengetahuan masyarakat yang minim sekali terhadap PNPm Mandiri perkotaan dan belum optimalnya peranan pihak terkait dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. 4. Faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada PNPm Mandiri Perkotaan adalah faktor umur. Faktor status di kelurahan mempengaruhi partisipasi responden dalam pertemuan, faktor jenis kelamin mempengaruhi bentuk sumbangan dan keaktifan dalam kegiatan. Faktor jenis pekerjaan mempengaruhi bentuk sumbangan yang diberikan. Faktor pendidikan memberikan pengaruh terhadap kehadiran dan keaktifan dalam kegiatan. 5. Faktor peran pemerintah, pengurus kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat dan peran fasilitator yang merupakan faktor eksternal mempengaruhi seluruh bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat kecuali pada partisipasi dalam pertemuan dan keaktifan berdiskusi dalam pertemuan.

F. Kerangka Pikir Penelitian

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program penanggulangan kemiskinan yang berada pada klaster ke-II, yaitu Klaster Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan dari instrumen utama penanggulangan kemiskinan klaster ke-II tersebut adalah mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Kabupaten Mesuji merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang melaksanakan program PNPM Mandiri yang meliputi PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi (PNPM-MPI), dan PNPM Infrastruktur Pedesaan (RIS). Hingga tahun 2013 pemerintah telah menggelirkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri sebesar Rp51.200 milyar untuk Kabupaten Mesuji. Dana BLM PNPM Mandiri untuk Kabupaten Mesuji tersebut didistribusikan kepada seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji, salah satunya adalah Kecamatan Tanjungraya. Selama kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2013 pemerintah telah menggelirkan dana BLM PNPM Mandiri sebesar Rp10.340 milyar.

Kecamatan Tanjungraya merupakan wilayah kecamatan yang cukup penting untuk dinilai atau dievaluasi implementasi PNPM Mandiri-nya. Hal itu dikarenakan Kecamatan Tanjungraya merupakan sentra perekonomian dan pusat pemerintahan di Kabupaten Mesuji. Keberhasilan implementasi PNPM Mandiri

di Kecamatan Tanjungraya akan dapat menjadi contoh dan bahkan penunjang bagi keberhasilan pembangunan wilayah-wilayah penyangganya (*hinterland*).

Salah satu aspek yang penting untuk dinilai dan dievaluasi adalah persepsi masyarakat terhadap PNPM Mandiri dan tingkat partisipasi masyarakat kecamatan Tanjungraya terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan Tanjungraya. Persepsi masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap PNPM Mandiri itu sendiri tentunya merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Kecamatan Tanjungraya.

Persepsi masyarakat Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji terhadap tujuan-tujuan PNPM akan mencerminkan segala tindakan yang dilakukan masyarakat dalam setiap tahapan program diorientasikan pada upaya-upaya mencapai tujuan dan keberhasilan program. Begitu juga halnya dengan persepsi masyarakat Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji terhadap prinsip-prinsip PNPM Mandiri akan mencerminkan konsistensi penerapan nilai-nilai dasar sebagai landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri di Kecamatan Tanjungraya.

Sedangkan partisipasi itu sendiri merupakan elemen penting dalam pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak saja menjadi instrumen dan tujuan, namun juga menjadi roh pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penilaian terhadap tingkat atau derajat partisipasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri sangat penting dilakukan, termasuk di Kecamatan Tanjungraya baik itu pada tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan. Penilaian terhadap tingkat atau derajat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan

Tanjungraya hanya dilakukan pada kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri yang melibatkan partisipasi seluruh masyarakat (bukan perwakilan). Selain itu, penilaian terhadap tingkat atau derajat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan Tanjungraya didasarkan pada teori tipologi delapan tangga partisipasi Arnstein yang membagi tingkat partisipasi masyarakat kedalam delapan tangga, yaitu Manipulasi (*Manipulation*), Terapi (*Therapy*), Pemberian Informasi (*Information*), Konsultasi (*Consultation*), Penentrman (*Placation*), Kemitraan (*Partnership*), Pendelegasian (*Delegated Power*), Kendali Warga (*Citizen Control*).

Secara sederhana kerangka pikir penelitian ini disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian

